

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan manusia, demikian pula bagi kehidupan suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan suatu bangsa, pendidikan memegang peranan yang sangat penting, karena melalui pendidikan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu bangsa dibentuk dan ditingkatkan dan pendidikan sebagai salah satu proses perubahan pada pembentukan sikap, kepribadian dan keterampilan manusia untuk menghadapi masa depan.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh sebagai faktor-faktor yang menyangkut perilaku manusia, kemampuan dan kemauan belajar sehingga pada akhirnya proses mendorong pertumbuhan dan perkembangannya kearah suatu tujuan yang dicita-citakan dan diharapkan perubahan tersebut membawa dampak positif.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu fondasi yang mempelajari tentang moral, etika maupun tingkah laku, selain itu Pendidikan Kewarganegaraan yang mengandung materi (bahan ajar) yang berhubungan erat dengan pembentukan sikap dan kepribadian diri sebagai seorang siswa, memiliki disiplin yang tinggi dalam mengadakan interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan pasal 31 ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa “Pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan nasional negara Indonesia. Oleh sebab itu seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam pencapaian tujuan nasional tersebut. Komponen pendidikan merupakan komponen yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembentukan karakter warga negaranya terutama karakter dari setiap peserta didik. Jika melihat yuridis formal Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab 1 Pasal 1 dinyatakan :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesian memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif (Mulyasa, 2013: 7).

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu sarana dalam membentuk karakter warga

negara yang baik dan merupakan rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggungjawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dalam UUD 1945.

Peranan PPKn sebagai pendidikan nilai dan moral memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan karakter warga negara yang mengharapkan peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan namun tetap memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dan etika demokrasi bangsa Indonesia. Walaupun pengembangan kemampuan dan pemebentukan karakter bukanlah menjadi peranan PPKn semata, namun peran PPKn sangat strategis. Demikian pula dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan dalam pasal 3 yang berbunyi :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membuat watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhla, mulia, sehat, berilmu,cakap,kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab”.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dapat melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, nasionalis, dan demokratis sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan

diharapkan muncul personal individu-individu yang mampu mengimplementasikan hak dan kewajibannya secara santun, jujur, demokratis dan ikhlas. Untuk menyampaikan nilai-nilai ini, maka tanggung jawab guru sangat diperlukan.

Demokrasi merupakan gagasan atau pandangan yang mengutamakan perasaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua gurudan siswa disekolah. Salah satu tempat yang strategis yang menanamkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi muda yang beriman, bertaqwa, berilmu, bermoral dan memiliki sikap demokratis.

Secara khusus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berusaha untuk menanamkan nilai, norma dan moral kepada peserta didik dengan tujuan agar memiliki pengetahuan tentang hukum, politik, moral dan sikap demokratis. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa, praktik pendidikan demokrasi cenderung menitik beratkan pada penguasaan aspek pengetahuan dan mengabaikan pengembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan. hal ini kurang memberi kesempatan secara luas kepada siswa untuk menyampaikan ide-ide, mengembangkan pengalaman dan potensi yang dimilikinya. Akibatnya siswa memiliki pengetahuan tentang demokrasi tetapi tidak mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dan siswa kurang kritis dan kreatif terhadap suatu permasalahan.

Di samping itu, guru hanya menggunakan metode pembelajaran ceramah yang hanya mentransfer (*transfer of knowlage*), dimana sebagai akibatnya siswa

kurang semangat untuk belajar, siswa cepat bosan pada saat pembelajaran berlangsung, dan siswa pasif dan kurang mendukung untuk pembentukan sikap demokratis. Strategi pembelajaran guru tersebut harus *direformasi* dengan strategi pembelajaran yang menimbulkan siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi guru harus secara teratur menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi masalah-masalah aktual, sosial, dan membahas suatu masalah dari berbagai sudut pandang.

Kompetensi seorang guru mata pelajaran PPKn dalam mengajar siswa di kelas memiliki peran penting dalam mengajari, membimbing dan mendidik untuk menjadikan siswa sebagai teman dalam proses belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan ide/gagasan dan mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten, serta bijaksana di sekolah maupun di luar sekolah karena adanya kompetensi seorang guru maka sikap demokratis siswa akan lebih baik.

Model dan strategi mengajar guru dialog-interaktif yang bersifat partisipatoris tersebut akan mengakibatkan interaksi antara siswa dengan guru dan antar siswa itu sendiri. Metode ini supaya berjalan dengan baik harus dikembangkan sikap menghargai perbedaan pendapat, toleransi terhadap orang lain, kemampuan berpikir kritis, musyawarah yang sehat dan jujur, menyampaikan pendapat yang santun dan saling percaya. Siswa sebagai salah satu komponen generasi muda, harus terus-terus dibina dan dikembangkan sikap demokratisnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Guru PPKn Dalam Membina Sikap Demokratis Siswa Kelas XI Di SMA Negeri 2 Bandar Tahun Pelajaran 2018/2019.

1.2 Batasan Masalah

Banyak masalah yang dapat dikaji dalam proposal penelitian ini, namun agar proposal penelitian ini lebih terarah dalam meneliti permasalahan, mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti, dimana masalah yang akan diteliti ialah peran guru PPKn dalam membina sikap demokratis siswa.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang penting dalam sebuah proposal, karena pada bagian ini akan dimuat masalah yang akan diteliti, dan juga supaya penelitian yang dilakukan dalam meneliti permasalahan lebih terarah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadikan permasalahan dalam proposal penelitian ini adalah bagaimana peran guru PPKn dalam membina sikap demokratis siswa?

1.4 Tujuan Penelitian

Sudah merupakan keharusan bagi setiap orang yang melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan tujuan yang hendak dicapai, sebab tanpa tujuan segala sesuatu yang dilakukan untuk membawa hasil yang sia-sia. Seperti dikemukakan Basution (2007:17) bahwa : “tiap peneliti harus mempunyai tujuan atau tujuan yang harus dicapai”.

Tujuan berhubungan erat dengan masalah yang dipilih, serta analisis terhadap masalah tersebut. Banyaknya tujuan dapat mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru PPKn dalam membina sikap demokratis siswa.

1.5 Manfaat Penelitian

Sebagaimana lazimnya bahwa penelitian harus mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademik untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti dalam hal pentingnya peran guru PPKn dalam membina sikap demokratis siswa.
2. Secara teoritis dapat menambah wawasan dan informasi bagi guru-guru dan calon guru dalam membina sikap demokratis siswa.
3. Bagi masyarakat secara praktis hasil penelitian ini sebagai informasi bahwa peran guru PPKn sangat besar dalam membina sikap demokratis siswa.
4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.